



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor SOP	065/0244/diskes
Tanggal Pembuatan	01 June 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 June 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan  Dr. Hj. Rini Retno Sukesi, M. Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590602 198709 2 001
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;5. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;	<ol style="list-style-type: none">1. Tercantum sebagai tim pertimbangan pada Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur2. Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi3. Dapat bekerja sama dalam tim
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Atasan PPID2. PPID Utama3. PPID Pembantu4. Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja2. Term of Reference3. ATK4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu		Mulai			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik
2.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang Tidak termasuk dalam DIP
3.	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik
4.	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan
5.	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan

